ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi yang pesat di era globalisasi telah memberikan dampak signifikan terhadap munculnya berbagai bentuk kejahatan baru, termasuk perdagangan narkotika. Kejahatan narkotika kini tidak lagi sekadar masalah domestik, melainkan telah berkembang menjadi kejahatan lintas negara. Dampaknya tidak hanya mengancam kesehatan masyarakat, tetapi juga mengganggu stabilitas sosial dan keamanan nasional. Permasalahan dalam penelitian ini membahas mengenai efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku perdagangan narkotika di Indonesia dan sejauh mana peran aktif pemerintah Indonesia dalam menangani perdagangan narkotika sebagai kejahatan transnasional. Tujuan dari penelitian ini adalah menjelaskan konstruksi penegakan hukum yang dapat dilakukan serta mengevaluasi kebijakan dan strategi pemerintah Indonesia dalam menghadapi ancaman perdagangan narkotika lintas negara.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data sekunder yang digunakan meliputi bahan hukum primer peraturan perundang-undangan dan berbagai konvensi internasional yang telah diratifikasi, serta bahan hukum sekunder dari literatur dan jurnal ilmiah. Teknik analisis data menggunakan analisis data kualitatif dengan pendekatan deduktif dan induktif untuk menguraikan pola penegakan hukum dan kebijakan pemerintah Indonesia selaku negara berdaulat.

Hasil penelitian dalam penegakan hukum terhadap perdagangan narkotika di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, lemahnya sinergi antar aparat penegak hukum, keterbatasan teknologi dan regulasi. Selain itu, canggihnya modus operandi peyelundupan narkotika yang menggunakan berbagai lintas jalur dan cara turut menyulitkan pendeteksian. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya, secara preemtif, preventif maupun represif, melalui kerja sama bilateral, regional, dan multilateral. Kesimpulan dari penelitian ini adalah kejahatan narkotika sebagai lintas negara membutuhkan pendekatan lintas sektoral yang terintegrasi. Saran dalam penelitian ini adalah dapat dilakukan penguatan lembaga BNN dan aparat penegak hukum dalam hal intelijen, teknologi, dan kapasitas sumber daya manusia. Dengan tidak meninggalkan harmonisasi peraturan perundang-undangan melalui studi komparasi, peningkatan kerja sama antarnegara, serta penguatan edukasi.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Perdagangan, Narkotika, Kejahatan Transnasional

ABSTRACT

The development of information technology in era globalization has had a significant impact on emergence of new forms of crime, including narcotics trafficking. Narcotics crime is no longer just a domestic problem, but has developed into a transnational crime. The impact not only threatens health, but also disrupts social stability and national security. The problem in this research discusses effectiveness law enforcement against narcotics traffickers in Indonesia and extent of Indonesian government's active role in dealing with narcotics trafficking as a transnational crime. The purpose of this study is to explain construction of law enforcement that can be done and evaluate the policies and strategies Indonesian government in dealing with threat of transnational narcotics trafficking.

This study uses a normative juridical method with a legislative approach and a conceptual approach. The secondary data used includes primary legal materials from legislation and various ratified international conventions, as well as secondary legal materials from literature and scientific journals. Data analysis techniques use qualitative data analysis with deductive and inductive approaches to describe patterns of law enforcement and government policy in Indonesia as a sovereign state.

The results of research on law enforcement against narcotics trafficking in Indonesia reveal various challenges, including weak synergy between law enforcement agencies, technological limitations, and regulatory constraints. In addition, sophisticated smuggling methods that utilize various routes and means further complicate detection efforts. The government has implemented various efforts, both preemptive, preventive, and repressive, through bilateral, regional and multilateral cooperation. The conclusion this study is transnational drug crimes require an integrated, cross-sectoral approach. Recommendation in this study is to strengthen the National Narcotics Agency (BNN) and law enforcement agencies in terms of intelligence, technology, and human resource capacity. This should be done without neglecting the harmonization of legislation through comparative studies, enhancing international cooperation, and strengthening education.

Keywords: Law Enforcement, Trafficking, Narcotics, Transnational Crime